

5. Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat
6. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal
7. Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/ BUMN kepada koperasi dan UKM
8. Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal
9. Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor
10. Meningkatnya perijinan usaha
11. Intensitas dan pengawasan perlindungan konsumen

Untuk Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-IV.C.29
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	76,14	80	85	90	95	100	100
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	2047	2078	2118	2159	2204	2255	2255
3	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-	-	-
4	Usaha Mikro dan Kecil	2045	2075	2115	2155	2200	2250	2250
II	Perdagangan							
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5,42	5,50	5,60	5,70	5,80	6,00	5,90
2	Ekspor Bersih Perdagangan	35.000.000	36.000.000	37.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000
3	Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha informal	100	115	130	145	160	165	165
III	Perindustrian							
1	Kontribusi industri terhadap PDRB	5,42	5,60	5,75	5,90	6,00	6,25	6,25
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industry	5,12	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,80
3	Pertumbuhan industri	325	350	360	370	380	390	390
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	67	70	75	80	85	90	90

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	22	218	252	260	267	267	✓	✓
7	Jumlah industri UKM meningkat	325	330	335	340	345	350	✓	✓
8	Jumlah ijin industry meningkat (IU)	15	50	65	75	80	85	✓	✓
9	Nilai ekspor meningkat	25.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	✓	✓
10	Volume ekspor meningkat (Ton)	11.000	12.000	15.000	20.000	30.000	11.000	✓	✓
11	Jumlah ijin usaha meningkat	80	150	150	150	150	150	✓	✓
12	Jumlah pedagang kecil, menengah dan besar meningkat	80	150	150	150	150	150	✓	✓
13	Jumlah pengawasan barang beredar	4	4	4	4	4	4	✓	✓

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan bidang perindustrian perdagangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah merupakan bagian integral dari pembangunan daerah pembangunan kabupaten secara utuh, termasuk memperhatikan juga kesinambungan perencanaan pembangunan terhadap keterpaduan program dan kegiatannya yang dipadukan dengan program dan kegiatan dari propinsi maupun nasional.

Pembangunan bidang perindustrian perdagangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk menuntaskan dan menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari masih rendahnya kemandirian (keberdayaan masyarakat) serta rendahnya aspek produktifitas dan akses terhadap sumber daya produktif. Disamping itu pula, pembangunan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah ditujukan dalam rangka mengatasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan sarana parasarana dasar perdagangan seperti pasar tradisional maupun modern, unit-unit pertokoan, pengawasan dan pengendalian pasar barang dan harga barang, serta pengendalian ekspor skala daerah; penyediaan sarana dan prasarana industri seperti penyediaan kawasan industri, pemberian fasilitas industri bagi masyarakat yang berusaha dibidang industri, penyederhanaan sistem regulasi dibidang industri skala daerah, serta pembinaan usaha industri; penyediaan sarana dan prasarana koperasi, pembinaan koperasi serta pemberian bantuan modal kepada koperasi; pembinaan dan pengawasan kepada usaha-usaha mikro kecil dan menengah; serta pemberian bantuan modal usaha kecil, menjadi tujuan program utama ditahun-tahun mendatang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas.

TABEL T-IV.C.14
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA SKPD PROPINSI
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan	-	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
2	Mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tidak adanya tenaga teknis laboratorium untuk operasionalisasi dan pengembangan kemetrolagian daerah	Tidak adanya tenaga ahli penera/tera ulang	Mengikutsertakan personil pada diklat kemetrolagian di Bandung
3	Mewujudkan pemantapan kelembagaan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM	Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme para pengelola koperasi dan sector usaha lainnya.	Dana yang disesuaikan untuk meningkatkan SDM baik konseptual maupun material tidak sepadan dengan target input yang diinginkan	Mengikutsertakan pada diklat dan kursus bagi pengurus koperasi
4	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Banyaknya UKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan banyak sekali undangan untuk mengadakan pameran yang dilaksanakan dipulau Jawa, Bali dan Batam, yang sebetulnya berdampak pada omzet penjualan/pemasaran produk tetapi tidak dapat terlaksana.	Keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut	-

TABEL T-IV.C.15
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN
TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melakukan penilaian kesehatan terhadap koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan	-	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
2	Pembangunan pasar tradisional	Terbatasnya dana pembangunan pasar	Minimnya dana bagi pembangunan, penambahan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Adanya dukungan dana dari APBN dan DAK untuk pembangunan pasar tradisional

TABEL T-IV.C.16
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN
ANALISIS KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	HASIL KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi yang belum optimal	Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendah profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya.	Dana yang disesuaikan untuk meningkatkan SDM baik konseptual maupun material tidak sepadan dengan target input yang diinginkan	Mengikutsertakan pada diklat dan kursus bagi pengurus koperasi
2	Minimnya permodalan koperasi dan UMKM	Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM	Kendala persyaratan dari perbankan	Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM secara optimal
3	Masih banyak koperasi yang tidak aktif	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.	-	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4	Tidak adanya tenaga teknis kemetrolgian	Tidak adanya tenaga teknis laboratorium untuk operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgian daerah	Tidak adanya tenaga ahli penera/tera ulang	Mengikutsertakan personil pada diklat kemetrolgian di Bandung

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas antara lain :

1. Pemberian fasilitas usaha dalam pengembangan IKM
2. Pengembangan pasar tradisional
3. Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan
4. Pengembangan promosi produk unggulan
5. Pentingnya pengawasan barang
6. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Kapuas sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
7. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran
8. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi
9. Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan berbadan hukum

Tabel T-IV.C.10
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL) DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN KAPUAS

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1	Peningkatan produk dan akses pasar melalui partisipasi pada pameran dagang diluar negeri, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pengiriman misi dagang, kerjasama perdagangan internasional, identifikasi potensi ekspor, kerjasama dengan Trade Promotion Organization dalam rangka pemberdayaan eksportir dan pengembangan produk dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.	Pembinaan dari pemerintah terhadap UKM-Koperasi mutlak diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat UUD 1945	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas harus terus menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
2	Tumbuhnya jumlah industry didaerah yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi	Perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian, industry dan pertambangan Tumbuh berkembangnya IKM	Fasilitasi kepada UMKM tentang adanya pameran-pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omzet penjualan bagi UMKM, baik pameran yang diadakan di pulau Kalimantan maupun pameran yang diadakan diluar pulau Kalimantan seperti diYogyakarta, di Bali dan Batam. Pameran yang dilakukan di pulau Kalimantan sudah dapat diakomodir sedangkan pameran yang dilakukan diluar pulau Kalimantan seperti Yogyakarta, Bali dan Batam belum samasekali terakomodir. Dalam rangka untuk meningkatkan SDM pengurus koperasi supaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis, diklat bidang perkoperasian kepada pengurus supaya koperasi dapat berkembang secara optimal. Diadakan pembinaan yang terus menerus kepada koperasi untuk dapat dibuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang. Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan propinsi supaya arus informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas

Visi merupakan perspektif, *point of view*, pandangan organisasi secara *holistic* (utuh), pandangan jauh kedepan, kemana, bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan. Karena itu visi harus mampu menjiwai organisasi hingga mampu mengaktualisasikan perencanaan dengan tepat.

Visi merupakan unsur pelaksanaan daerah (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus sesuai dengan Visi Kabupaten sebagai garis besar dari perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas untuk merealisasikan Visi Kabupaten dengan mengambil bagian yang mendukung Visi tersebut.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, adalah :

**TERWUJUDNYA IKLIM INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG
MAJU DAN MANDIRI SEBAGAI ELEMEN PENGGERAK
EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan; Menciptakan sinergi dalam aspek perekonomian di Kabupaten Kapuas salah satunya adalah membesarkan embrio usaha kecil menengah di masyarakat, koperasi dan industri perdagangan lainnya baik yang kecil, menengah, UKM maupun yang besar (investor) agar tercipta penyangga-penyangga percepatan ekonomi secara menyeluruh di masyarakat.

Memberdayakan masyarakat dalam berwirausaha dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memerlukan kemampuan mengarahkan, membina serta memfasilitasi usaha tersebut dalam membentuk pelayanan asistensi, konsultasi hingga pelayanan perijinan yang dipersyaratkan agar

legalnya usaha mereka. Tahapan pemberdayaan ini akan menjadi bagian penting mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat.

Perubahan situasi negara ini mempengaruhi berbagai perubahan perspektif kelembagaan, kinerja dan budaya instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam dunia industri, perdagangan dan koperasi. Maka diperlukan kemampuan untuk menganalisa dan mempertimbangkan secara cermat agar tercapai penggerak perekonomian.

Memperbesar pelayanan, memperkecil birokrasi pelayanan sehingga memperkecil cost pelayanan tersebut, sehingga peluang investasi yang dilirik oleh pengguna manfaat tidak menurun sejalan tuntutan otonomi memperbesar penghasilan daerah khususnya dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Akan halnya pendukung tetap (*permanent supporter*) seperti sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) harus dioptimalkan secara proporsional dengan memperhatikan lingkungan, hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya, dengan tahapan yang direncanakan pencapaiannya, upaya menterjemahkan kemampuan tersebut bisa lebih baik lagi. Tentu dengan pertimbangan kompetensi, keuangan dan tuntutan baik stakeholder maupun masyarakat. Dengan tujuan yang paripurna untuk pembangunan lokal, perspektif nasional.

TABEL T-IV.C.21
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN KAPUAS

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terciptanya iklim industri, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah sebagai elemen penggerak ekonomi pembangunan	1) Industri	Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industry tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa
	2) Perdagangan	Kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	3) Koperasi	Badan usaha yang beranggotakan perorangan ataupun badan hukum yang didirikan untuk kepentingan dan tujuan bersama yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi untuk memajukan dan untuk kemakmuran ekonomi anggotanya.
	4) UMKM • Usaha Mikro • Usaha Kecil • Usaha Menengah	Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Kriteria asset maksimal 50 juta, kriteria omzet maksimal 300 juta) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. (Kriteria asset 50 juta – 500 juta, kriteria omzet 300 juta – 2,5 milyar) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. (Kriteria asset 50 juta – 500 juta, kriteria omzet 300 juta – 2,5 milyar)
	5) Penggerak Perekonomian	dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan melalui program ekonomi kemasyarakatan.
	6) Maju	pembangunan diarahkan untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam dengan baik dibidang industri, perdagangan koperasi dan UMKM
	7) Mandiri	kemampuan nyata masyarakat dalam melaksanakan, mengelola dan mengembangkan sendiri kegiatan usaha ekonominya tanpa kehilangan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak terkait.

Sebaliknya apabila perumusan misi tidak realistis, akan membuka peluang-peluang yang tidak *supportive* terhadap visi yang telah dirumuskan sebelum ke tahap perumusan misi. Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, menjabarkannya ke dalam misi kinerja yaitu ;

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas.
2. Meningkatkan Kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar serta menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar wilayah, regional dan internasional;
3. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi.
4. Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM
5. Meningkatkan penggunaan sumber daya lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Maksud perumusan misi ini, yaitu ; Meningkatkan kualitas pelayanan yang menghasilkan produk seperti bimbingan/asistensi konsultasi industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penerima manfaat (stakeholder) akan bertumbuh kembang sesuai trend pasar, di harapkan Kabupaten Kapuas memberikan peluang investasi baik skala kecil maupun skala besar dan sekaligus memberikan kepastian hukum tentang tertibnya usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas, sedangkan penyangga perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah yang cenderung tidak terpengaruh krisis adalah UMKM dan Koperasi. Kelompok ini merupakan asset yang harus diberikan perhatian khusus demi perkembangannya agar mampu menjadi penggerak kokohnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas; Selanjutnya memberdayakan masyarakat untuk berwirausaha, mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah adalah menanamkan budaya bisnis, makro dan mikro, hal ini menandakan keterlibatan

masyarakat dalam berusaha meningkatkan taraf hidupnya semakin baik dengan hasil akhir meningkatkan pendapatan daerah di bidang usaha tersebut.

TABEL T-IV.C.23
PENYUSUNAN PENJELASAN MISI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN KAPUAS

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
Terciptanya iklim industri, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah sebagai elemen penggerak ekonomi pembangunan	1) Industri	1. meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas berusaha menata dan membangun kinerja aparatur melalui manajemen yang efisien agar dapat dicapai suatu pelayanan yang prima dengan kualitas standar yang sifatnya dapat memuaskan dunia usaha dan masyarakat luas
	2) Perdagangan	2. Meningkatkan Kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar serta menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar wilayah, regional dan internasional;	Diera global, perubahan begitu cepat dan dinamis maka potensi sektor indagkop dan UMKM harus didorong kemampuannya menjadi penggerak daya saing agar dapat mempunyai keunggulan kompetitif dan kooperatif dipasar global untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
	3) Koperasi	3. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi.	Dengan meningkatkan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, kemampuan koperasi dan UMKM menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
	4) UMKM • Usaha Mikro • Usaha Kecil • Usaha Menengah	4. Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM	Dengan potensi sumber daya yang ada dioptimalkan pengembangan dan pemanfaatannya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
	5) Elemen penggerak ekonomi pembangunan	5. Meningkatkan penggunaan sumber daya lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dengan mendorong penggunaan produk lokal, masyarakat akan mencintai dan menghargai produk sendiri, berusaha meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa agar roda perekonomian dapat berjalan lancar, melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan meningkatkan pelayanan kemetrolgian, meningkatkan pemantauan peredaran barang/jasa, kebutuhan pokok penting dan strategis
	6) Maju		
	7) Mandiri		

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang merupakan bentuk hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran member fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas ditampilkan pada tabel berikut :

TABEL T-IV.C.24
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	1 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia/aparat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8	8	15	18	20
		2 Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8	8	8	8	8
2	Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri.	1 Meningkatkan jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	5	10	15	20	25
		2 Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	2078	2118	2159	2204	2255
3	Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan pendukung usaha bagi KUKM	1 Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	398 5	408 5	423 6	443 8	450 10
		2 Meningkatkan jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	30	35	40	50	60
4	Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan	Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/ BUMN kepada koperasi dan UKM	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/ BUMN kepada koperasi dan UKM meningkat	58.745.111	65.992.111	70.326.614	75.289.111	80.377.111

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal serta penataan struktur industri	1	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	248	252	260	267	267
				Jumlah industri UKM meningkat	330	335	340	345	350
		2	Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	Jumlah ijin industri meningkat	50	65	75	125	125
				Nilai ekspor meningkat	36.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
				Volume ekspor meningkat (Ton)	11.000	12.000	15.000	20.000	30.000
		3	Meningkatnya perijinan usaha	Jumlah ijin usaha meningkat	150	155	160	165	170
				Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	150	155	160	165	170
		4	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	4	4	4	4	4

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas tidak bisa lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas yang diarahkan pada :

1. Pemantapan kembali Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas;
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas;
3. Mengembangkan perekonomian berbasis agrobisnis dan agroindustri yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi;
4. Memperbaiki struktur kelembagaan ekonomi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui pembinaan organisasi, manajemen dan pemberian dukungan permodalan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri.

**TABEL T-IV.C.26
PENENTUAN STRATEGI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia/aparatur
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
3	Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi
4	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah	jumlah usaha kecil dan menengah	Sosialisasi peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang UKM
5	Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Fasilitasi pelaksanaan penilaian koperasi berprestasi
6	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Fasilitasi pembiayaan dan pengendalian kredit program dana bergulir
7	Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM meningkat	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/ BUMN kepada koperasi dan UKM meningkat	Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/investor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
8	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan
		Jumlah industri UKM meningkat	Penguatan struktur industri
		Jumlah ijin industri meningkat	
		Nilai ekspor meningkat dan volume ekspor	Meningkatkan pertumbuhan investasi
9	Meningkatnya perijinan usaha	Jumlah ijin usaha meningkat	Penyuluhan dan sosialisasi UU No. 14 Tahun 20012 tentang SIUP
		Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	Pengembangan jaringan pasar dan sistem distribusi
10	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dari 10 (sepuluh) sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas ditetapkan beberapa kebijakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

TABEL T-IV.C.27
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERCIPTANYA IKLIM INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI SEBAGAI ELEMEN PENGGERAK EKONOMI PEMBANGUNAN			
MISI I : Meningkatkan kinerja aparat untuk mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen yang efisien.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia/aparat	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia/aparat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat
	2) Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
MISI II : Meningkatkan kemitraan koperasi dan UKM dengan Usaha pengusaha besar serta menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar wilayah, regional dan internasional.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1) Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	1) Meningkatkan jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi	Peningkatan promosi, pemasaran dan kemitraan dengan usaha menengah/besar dan IKM
	2) Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang UKM	Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam melakukan usaha dan fasilitasi pembukaan usaha
MISI III : Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi			

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1) Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistim pendukung usaha bagi KUKM	1) Meningkatkan jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Facilitasi pelaksanaan penilaian koperasi berprestasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat
	2) Meningkatkan jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Facilitasi pembiayaan dan pengendalian kredit program dana bergulir	Melakukan pembinaan dan sosialisasi LKM dan jenis skim permodalan
MISI IV : Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1) Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan	1) Meningkatkan jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/investor	Melakukan sosialisasi dan kesekretariatan dana bergulir, skim permodalan dan pembiayaan dari pemerintah, perbankan atau BUMN/BUMS
MISI V : Meningkatkan penggunaan sumber daya lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1) Meningkatkan pengembangan industry kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal	1) Meningkatkan industry pengguna bahan baku produk lokal	Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industry serta teknologi yang berwawasan lingkungan	Peningkatan peran IKM dalam menggunakan bahan lokal dengan pemberian sarana produksi serta pelatihan
	2) Meningkatkan volume, dan nilai ekspor		
	2) Meningkatkan perjanjian usaha	Penyuluhan dan sosialisasi UU No. 14 Tahun 2002 Tentang SIUP	Pembinaan usaha perjanjian
	3) Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan dan penertiban barang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD. Rencana Program Prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Berikut adalah Tabel Program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas.

TABEL T-IV.C.28
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN KAPUAS
PERIODE 2014-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014				2015		2016		2017		2018				Target	Rp (000)
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
1.Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	1.Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia /aparatur	3. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.15.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	85	90	87.000	91	89.000	93	99.000	94	110.000	95	122.000		122.000	95	122.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.1	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim (Buah)	100	100	1.500	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.500	500	2.500		2.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.2	2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bin)	12	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000		25.000	12	25.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.4	3. Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (org)	6	6	10.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000		10.000	30	10.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.6	4. Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah & jenis kendaraan dinas yg disediakan pemeliharaannya (R4=1;R2=8 unit)	100 %	100 %	2.000	100 %	2.000	100 %	3.000	100 %		3.500	100 %	3.500		3.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat	
			1.15.1.7	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bin)	12	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	6.000	12	6.000		6.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.15.1.8	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	2.000	12	2.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.9	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki (unit)	20	20	4.000	20	5.000	20	5.500	20	5.500	20	6.000	20	6.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.10	8. Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (paket)	1	1	5.000	1	5.000	1	5.500	1	5.500	1	6.000	1	6.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.11	9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	1	4.000	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.500	1	6.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.12	10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	1	1.000	1	1.000	1	2.000	1	2.000	1	3.500	1	3.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.13	11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (paket)	1	1	1.000	1	-	1	1.000	1	1.000	1	2.000	1	2.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.15	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Ekspl)	48	48	2.000	48	2.000	48	2.500	48	2.500	48	3.000	48	3.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.17	13. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	70	70	5.000	70	5.000	70	5.500	70	5.500	70	6.000	70	6.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.18	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan kerja keluar daerah (kali)	40	40	10.000	40	10.000	40	10.500	40	11.000	40	11.500	40	11.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.19	15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja/pembinaan/koordinasi/monitoring (kali)	30	30	5.000	30	5.500	30	6.000	30	6.000	30	6.500	30	6.500	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.1.20	16. Penyediaan non PNS	Jumlah tenaga teknis yang mendukung dinas (org)	7	6	5.500	6	6.000	6	8.000	6	10.000	6	12.000	6	12.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.15.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	5	4	116.000	3	118.000	2	132.000	1	146.000	-	163.000	-	163.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.3.2	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan lainnya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (org)	140	140	60.000	70	38.000	140	52.000	140	61.000	140	73.000	140	73.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.3.5	2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan (org)	140	140	56.000	140	70.000	140	80.000	140	85.000	140	90.000	140	90.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.3.1	3. Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah alat yang disediakan (paket)	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	1	10.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	116.000	100 %	118.000	100 %	132.000	100 %	146.000	100 %	163.000	100 %	163.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.5	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)	-	-	-	-	-	2	36.000	2	38.000	2	40.000	2	40.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.9	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Paket)	1	1	61.000	1	63.000	1	34.000	1	43.000	1	48.000	1	48.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.22	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.24	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1 unit ;R2=8 unit)	100 %	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	10.000	100 %	10.000	100 %	15.000	100 %	15.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.28	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1	10.000	1	10.000	1	12.000	1	15.000	1	20.000	1	20.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.2.29	6. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah dan jenis meubelair yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.15.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75	80	87.000	85	89.000	90	99.000	95	110.000	100	122.000	100	122.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Dalam Daerah dan Luar Daerah
			1.15.5.3	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (org)	8	8	87.000	15	89.000	18	99.000	20	110.000	22	122.000	22	122.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Dalam Daerah dan Luar Daerah
			1.15.4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang Pindah/Purna Tugas	2	4	29.000	4	30.000	4	33.000	6	37.000	4	41.000	4	41.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Dalam Daerah dan Luar Daerah
			1.15.4.1	1. Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah PNS yang Pindah/Purna Tugas	2	4	29.000	4	30.000	4	33.000	6	37.000	4	41.000	4	41.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	2. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	1.15.6	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan (%)	100	100	29.000	100	30.000	100	33.000	100	37.000	100	41.000	100	41.000	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.6.1	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	80	81	7.250	82	7.500	83	8.250	84	9.250	85	10.250	85	10.250	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.6.2	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	80	81	7.250	82	7.500	83	8.250	84	9.250	85	10.250	85	10.250	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.6.3	3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan keuangan semester II	80	81	7.250	82	7.500	83	8.250	84	9.250	85	10.250	85	10.250	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat
			1.15.6.4	4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	80	81	7.250	82	7.500	83	8.250	84	9.250	85	10.250	85	10.250	Sekretariat Dinas Perindagkop	Selat

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2. Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri.	1. Meningkatkan jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	1.15.16	Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM binaan (%)	80	85	231.000	87	237.000	89	263.000	91	293.000	95	325.000	95	325.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.16.3	1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya kegiatan temu usaha UMKM dengan usaha besar dan atau investor (kali)	1	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	35.000	1	40.000	1	40.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.16.5	2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	2	2	161.000	2	162.000	2	181.000	2	203.000	2	230.000	2	230.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.16.6	3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah WUB yang terlatih (org)	40	40	45.000	40	50.000	40	52.000	40	55.000	40	55.000	40	55.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
	2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah meningkat	1.15.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang aktif (%)	80	85	318.000	87	325.000	89	362.000	91	402.000	95	447.000	95	447.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.15.1	1. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	Tersedianya data WUB (bhn)	12	12	50.000	12	50.000	12	52.000	12	55.000	12	55.000	12	55.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.15.15.2	2. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan tentang UKM (org)	30	30	25.000	30	25.000	30	30.000	30	30.000	30	35.000	30	35.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.15.7	3.Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	Jumlah pengetahuan masyarakat tentang jaringan infrastruktur UMKM meningkat	30	30	95.000	30	100.000	30	110.000	30	120.000	30	130.000	30	130.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	Kabupaten Kapuas
			1.15.15.8	4.Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah bantuan yang diberikan kepada UKM dan Koperasi (Paket)	-	1	150.000	1	150.000	1	170.000	1	197.000	1	227.000	1	227.000	Bidang UMKM Dinas Perindagkop	
3. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelenbagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistim pendukung usaha bagi KUKM	1.Bertambah nya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	1. Jumlah koperasi aktif	1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	76	80	174.000	85	178.000	90	197.000	95	219.000	100	244.000	100	244.000	Bidang Koperasi Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
		2. Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/ Sehat	1.15.18.1	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	8	8	27.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	Bidang Koperasi Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			1.15.18.2	2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan parkoperasi	Jumlah peserta yang mengikuti BinteK /pelatihan koperasi	20	20	62.000	20	63.000	20	65.000	23	70.000	23	70.000	23	70.000	Bidang Koperasi Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.15.18.5	3. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	30	30	65.000	30	65.000	30	77.000	30	94.000	30	114.000	30	114.000	Bidang Koperasi Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			1.15.18.9	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring (kali)	1	1	20.000	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	Bidang Koperasi Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
		Jumlah Koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM (Rp. Miliar)	55	59	231.000	66	237.000	70	263.000	75	293.000	80	325.000	80	325.000	Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Dinas Perindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
4. Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Jumlah Koperasi dan UKM yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	1.15.17.1	1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	4	4	59.000	4	60.000	4	60.000	4	62.000	4	64.000	4	64.000	Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Dinas Perindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			1.15.17.5	2. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (bin)	12	12	140.000	12	142.000	12	168.000	12	196.000	12	226.000	12	226.000	Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Dinas Perindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			1.15.17.4	3. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	10	10	32.000	10	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Dinas Perindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
5. Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal serta penataan struktur industri	1.Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	1.Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Industri yang menerapkan SNI (%)	5	6	231.000	8	237.000	9	263.000	11	293.000	12	325.000	12	325.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.07.17.1	1. Pembinaan kemampuan teknologi industry (magang)	Jumlah pengrajin yang terlihat	-	15	231.000	15	237.000	15	263.000	15	293.000	15	325.000	15	325.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
		2.Jumlah Industri meningkat	2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase produktivitas industri kecil dan menengah (%)	70	73	260.000	75	266.000	77	296.000	80	329.000	83	366.000	83	366.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.07.16.2	1. Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah bantuan yang diberikan kepada pengrajin rotan (paket)	-	1	260.000	1	266.000	1	296.000	1	329.000	1	366.000	1	366.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
		3.Jumlah industri UKM meningkat	2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi (%)	10	13	145.000	15	148.000	18	164.000	20	183.000	25	203.000	25	203.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.07.15.5	1.Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	3	3	145.000	3	148.000	3	164.000	3	183.000	3	203.000	3	203.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.07.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri (%)	65	70	130.000	78	133.000	80	148.000	83	165.000	86	183.000	86	183.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.07.15	1.Pengembangan fasilitas showroom Dinas Perindagkop UMKM	Jumlah barang kerajinan yang disediakan (paket)	-	1	130.000	1	133.000	1	148.000	1	165.000	1	183.000	1	183.000	Bidang Industri Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
	2.Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	1.Nilai ekspor meningkat	2.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan (US\$)	35.000	36.000	174.000	37.000	178.000	40.000	197.000	45.000	219.000	50.000	244.000	50.000	244.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Luar Daerah
		2.Volume ekspor meningkat (Ton)	2.06.17.2	1. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	2	2	159.000	2	163.000	2	182.000	2	204.000	2	229.000	2	229.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Dalam dan Luar Daerah
			2.06.17.1	2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10	10	15.000	10	15.000	10	15.000	10	15.000	10	15.000	10	15.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Dalam dan luar negeri

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.Meningkatnya perijinan usaha	1. Jumlah ijin usaha meningkat	2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri (%)	70	73	174.000	75	178.000	77	197.000	80	219.000	83	244.000	83	244.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.06.18.3	1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk ▪ Pasar Murah ▪ Pembangunan an Pasar	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan (kali)	2	2	154.000	2	158.000	2	173.000	2	189.000	2	208.000	2	208.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
					Jumlah pasar yang dibangun	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
			2.06.18.6	2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah laporan harga sembako (bln)	12	12	10.000	12	10.000	12	12.000	12	15.000	12	18.000	12	18.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.06.18.7	3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tersedianya informasi kepada masyarakat (bln)	12	12	10.000	12	10.000	12	12.000	12	15.000	12	18.000	12	18.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
		2.Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (%)	75	78	159.000	80	163.000	85	181.000	90	201.000	95	224.000	95	224	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.06.19.1	1. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Penyediaan tempat berusaha bagi PKL dan pedagang asongan (paket)	1	1	20.000	1	20.000	1	25.000	1	30.000	1	35.000	1	35.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kuala Kapuas
			2.06.19.3	2. Penataan tempat berusaha	Tertatanya saran a dagang bagi PKL dan pedagang asongan (paket)	-	1	139.000	1	143.000	1	156.000	1	171.000	1	189.000	1	189.000	Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM	Kuala Kapuas
	4.Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar	70	72	203.000	75	207.000	77	230.000	80	256.000	85	285.000	85	285.000	Bidang PK dan Kemetrologian Disperindagkop UMKM	Dalam dan luar daerah
			2.06.15.1	1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (kali)	10	10	15.000	10	15.000	10	20.000	12	25.000	15	30.000	10	30.000	Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperindagkop UMKM	Luar daerah

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua Pasal 6 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 (dua) urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan selanjutnya diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan (1) Urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan ; (2) Menyelenggarakan tugas pembantuan dan ; (3) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas untuk urusan wajib menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah sedangkan untuk urusan pilihan menangani urusan industri dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 159 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas, pasal 5 maka kedudukan dan tugas pokok Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan.



Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 159 Tahun 2013 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan
1. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum ;
2. Pengelolaan urusan perencanaan dibidang ketatausahaan dan pembangunan dibidang industri, perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah ;
3. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah atas dasar keterpaduan dan kebijakan ;
4. Pemberian perizinan serta bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah ;
5. Bimbingan teknis perlindungan konsumen dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- 6 Bimbingan dan pengawasan kegiatan kemetrolagian ;
7. Bimbingan, pengawasan, fasilitasi bantuan modal usaha dan penilaian pemeringkatan koperasi ;
8. Bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang industri perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah ;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, organisasi / asosiasi dunia usaha diwilayah daerah ;
10. Evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis bimbingan dan pengembangan industri perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah ;

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Tata Usaha

c. Bidang terdiri atas :

1. Bidang Industri, membawahi :

- Seksi Kimia dan Agro
- Seksi Industri Logam, Mesin Tekstil dan Aneka
- Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika

2. Bidang Perdagangan, membawahi :

- Seksi Bina Pasar dan Distribusi
- Seksi Ekspor dan Impor
- Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan

3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, membawahi :

- Seksi Kerjasama Informasi dan Perlindungan Konsumen
- Seksi Kemetrolgian
- Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

4. Bidang Koperasi, membawahi :

- Seksi Koperasi Konsumen dan Produsen
- Seksi Koperasi Aneka Usaha
- Seksi Kelembagaan Koperasi dan Penyuluhan

5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :

- Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Pertanian, Perdagangan dan Holtikultura
- Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri, Jasa, Perdagangan dan Aneka Usaha
- Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan

6. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan, membawahi :

- Seksi Permodalan
- Seksi Simpan Pinjam
- Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan Koperasi

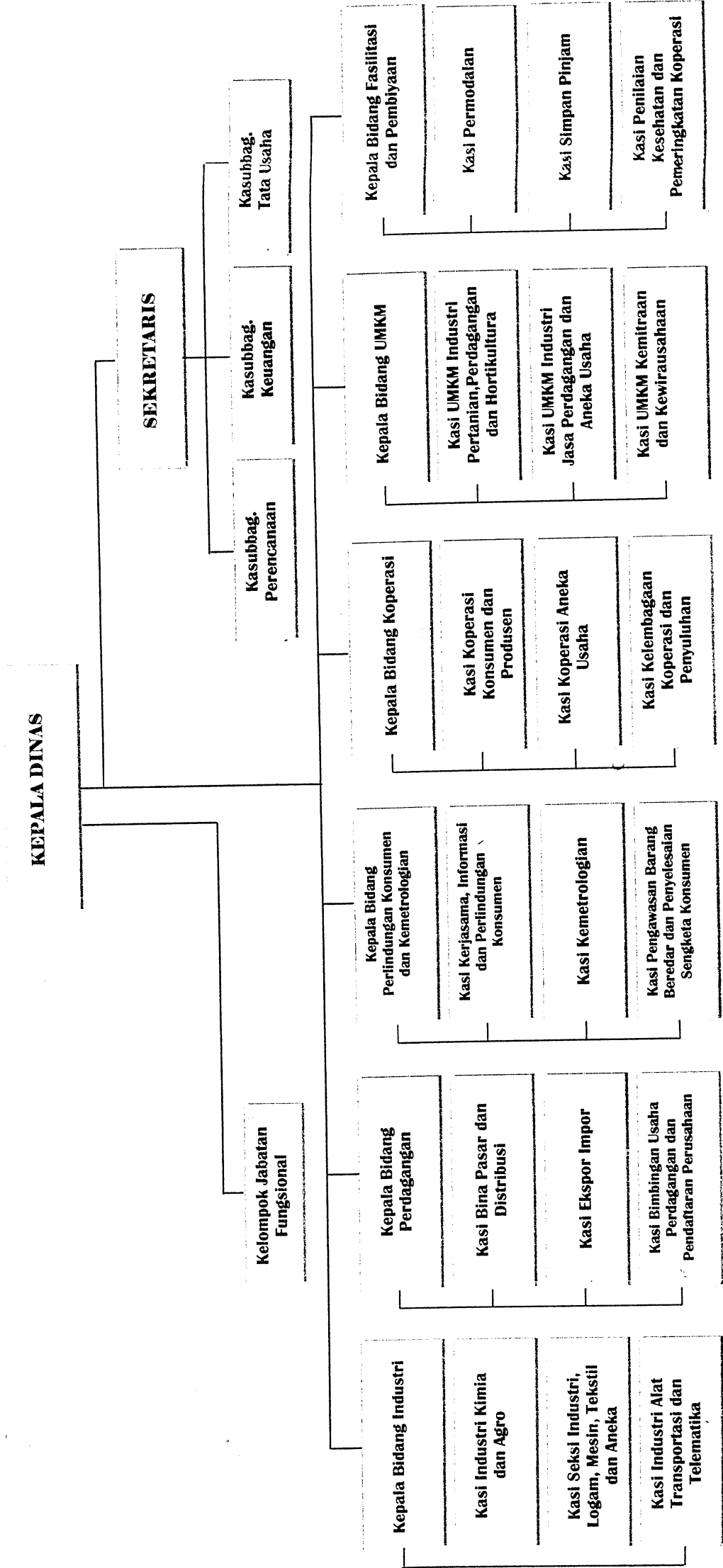
d. Kelompok Jabatan Fungsional :

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar Struktur Organisasi terlihat pada gambar 2.

Berdasarkan Perda Kab. Kapuas
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 07 Juli 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDAGKOP UMKM KAB. KAPUAS



2.2 Sumberdaya SKPD

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas berdasarkan pangkat/golongan

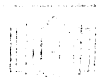
No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	8	
2	Golongan III	43	
3	Golongan II	5	
4	Golongan I	1	
Jumlah		57	

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 1 orang (1,78 %), golongan II sebanyak 5 orang (8,93 %), golongan III sebanyak 42 orang (75,00 %), golongan IV sebanyak 8 orang (14,28 %)

Tabel 2 : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/S2	2	
2	Sarjana/S1	25	
3	Sarjana Muda/Diploma III	4	
4	SLTA	23	
5	SLTP	-	
6	SD	3	
Jumlah		57	

Data pada tabel diatas, menunjukan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas didominasi sarjana 25 orang (43,86 %), pascasarjana sebanyak 2 orang (3,50 %), sarjana muda 4 orang (7,02 %), SLTA sebanyak 23 orang (40,35 %), SD sebanyak 3 orang (5,26 %)



Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan profesional (sarjana sebanyak 43,86 %). De mikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumberdaya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM telah dilengkapi dengan sarana prasaran yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas

No	Sarana dan Prasarana	Volume		Keterangan
		Luas	Satuan	
1	2	3	4	5
A	Asset Tanah			
1	Tanah di Jalan Tambun Bungai	5.500	M ²	
2	Tanah di Jalan Tambun Bungai	1.140	M ²	
3	Tanah di Jalan Melati	964	M ²	
4	Tanah di Jalan Melati	375	M ²	
5	Tanah di Jalan Melati	960	M ²	
6	Tanah di Jalan A. Yani	800	M ²	
7	Tanah di Jalan Kolam Tengah	3.264	M ²	
8	Tanah di Desa Mandomai	613	M ²	
9	Tanah di Desa Dahirang	571	M ²	
10	Tanah di Desa Basarang	4.970	M ²	
11	Tanah di Desa Pulau Telo	680	M ²	
12	Tanah di Desa Dadahup	600	M ²	
Jumlah Asset Tanah		20.437	M ²	

No	Sarana dan Prasarana	Volume		Keterangan
		Luas	Satuan	
1	2	3	4	5
B	Asset Bangunan			
1	Bangunan gedung induk kantor Disperindagkop UMKM Kab. Kapuas di Jalan Tambun Bungai No. 7 Kuala Kapuas	6.039	M ²	
2	Bangunan gedung Work Shop di Jalan Tambun Bungai	192	M ²	
3	Bangunan gedung pertama di Jalan Tambun Bungai	170	M ²	
4	Bangunan gedung eks koperasi (KPU) di Jalan Tambun Bungai	400	M ²	
5	Bangunan gedung rumah dinas eks perdagangan di Jalan Melati	72	M ²	
6	Bangunan gedung rumah eks industri di Jalan Melati	56	M ²	
7	Bangunan gedung rumah kadis eks industri di Jalan Melati	63	M ²	
8	Pagar kantor di Jalan Tambun	247	M ²	
9	Gedung pengelolaan pakan ikan di Desa Sei Kehu	72	M ²	
10	Kios buah di Kecamatan Basarang	30	M ²	
11	Bengkel kerja di Jalan Tambun Bungai	80	M ²	
C	Asset Mesin dan Peralatan			
1	Kendaraan roda 2	8	Unit	
2	Komputer	15	Unit	
3	Printer	12	Unit	
4	Peralatan kantor			
1	Filing kabinet	16	Buah	
2	Meja/kursi	200	Buah	
3	Laptop	6	Unit	
4	Netbook	3	Unit	
5	AC	20	Unit	
6	Lemari Besi	7	Buah	
7	Sound system	1	Buah	
8	TV telekompren	1	Buah	
9	CCTV	1	Paket	
10	Kipas angin	10	Buah	
11	Brankas	2	Buah	
12	Mesin jahit kain	4	Buah	
13	Mesin jahit purun	4	Buah	
14	Timbangan beras	2	Buah	
15	Lemari kayu	10	Buah	
16	Tenda	10	Buah	
17	Dispenser	10	Buah	
18	Handycam	1	Buah	
19	Tangga alumunium	1	Buah	
20	Alat pemadam portable	1	Buah	
21	Vacum frams	2	Buah	
22	Timbangan elektronik	2	Buah	
23	Juicer	1	Buah	
24	Alat perekat alumunium foil	1	Buah	
25	Packaging machine	1	Buah	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Bidang Industri

a. Pelatihan bagi Pengusaha Industri Kecil Menengah

Pelatihan bagi pengusaha industri kecil menengah ditujukan agar para pengusaha memiliki wawasan dan kemampuan untuk bisa mengembangkan usahanya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas berhasil menjaring 30 orang IKM meliputi usaha rotan, purun dan makanan. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa para peserta cukup memahami materi yang disampaikan dan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Untuk melihat sejauh mana pelatihan ini memberikan dampak terhadap pengusaha memang harus dilakukan evaluasi pasca kegiatan guna melihat hasil serta dampaknya bagi peningkatan produktivitas peserta pelatihan. Selain itu dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan agar kapasitas mereka semakin meningkat seiring dinamika persaingan usaha yang makin ketat.

b. Data Potensi Industri

Keadaan Industri di Kabupaten Kapuas tergambar dari jumlah perusahaan Industri dan penyerapannya terhadap tenaga kerja. Pada umumnya perusahaan industri di Kabupaten Kapuas meliputi : (1). Perusahaan industri kimia agro dan hasil hutan, (2). Perusahaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka (Ilmea) serta (3). Perusahaan industri usaha anyaman rotan.

Berdasarkan data pada tahun 2012 banyaknya perusahaan kimia agro dan hasil hutan di Kabupaten Kapuas berjumlah 178 perusahaan yang terdiri dari industri formal dan non formal dimana jumlah unit usaha terbanyak pada jenis industri tahu/tempe dan foto copy. Ke 178 perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.102 orang dimana industri pengolahan rotan, anyaman purun dan industri komponen bahan bangunan paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu masing-masing sebanyak 132 dan 208 orang.

Sementara itu jumlah perusahaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ilmea) di Kabupaten Kapuas berjumlah sekitar 127 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 359 orang. Diantara 127 perusahaan tersebut maka jenis industri

service sepeda motor / mobil memiliki paling tenaga kerja. Sementara sejumlah usaha anyaman rotan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2012 berjumlah 4 unit usaha untuk sektor formal dan 193 untuk non formal dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 520 orang. Unit usaha ini kebanyakan berada di Dadahup dan Kapuas Barat.

Tabel 6⁴
Data Perkembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
di Kabupaten Kapuas S/D Desember 2012.

No	Jenis Industri	T A H U N				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Minuman Ringan/Air Mineral	4	13	13	16	13
2	Meubel Kayu	1	49	49	49	18
3	Roti	1	4	4	5	4
4	Komponen Bahan Bangunan	2	52	52	52	45
5	Foto Copy	4	233	233	233	34
6	Saos Tomat	1	-	-	-	-
7	Crumb Rabber	-	1	1	1	1
8	Pengolahan Rotan	-	5	5	5	4
9	Es Batu	-	29	5	24	-
10	Tahu/Tempe	-	12	12	12	46
11	Kerupuk Amplang	-	1	1	1	-
12	Tepung Beras	-	1	1	1	1
13	Kerupuk	-	1	1	1	3
14	Batu Bata	-	3	3	3	5
15	Batako	-	2	2	2	2
16	Kripik Singkong	-	1	1	2	2
17	Virgin Coconut Oil (CVO)	-	3	3	3	-
Jumlah Industri		13	409	385	410	178
Jumlah Tenaga Kerja		40	1.527	1.537	1.545	1.102

Kondisi Perkembangan Industri sampai tahun 2012

Jumlah unit usaha : 178 unit usaha.

Jumlah tenaga kerja : 1.102 orang.

Tabel 7.9
Usaha Anyaman Rotan Kabupaten Kapuas Tahun 2012

No	Lokasi	Jumlah Unit Usaha		Jumlah Tenaga Kerja
		Formal	Non Formal	
1	2	3	4	5
1	Kapuas Kuala	-	-	-
2	Tamban Catur	-	-	-
3	Kapuas Timur	-	-	-
4	Selat	2	25	150
5	Bataguh	1	-	87
6	Basarang	-	-	-
7	Kapuas Hilir	1	-	5
8	Pulau Petak	-	16	32
9	Kapuas Murung	-	36	72
10	Dadahup	-	62	102
11	Kapuas Barat	-	40	76
12	Mantangai	-	14	28
13	Timpah	-	-	-
14	Kapuas Tengah	-	-	-
15	Pasak Talawang	-	-	-
16	Kapuas Hulu	-	-	-
17	Mandau Talawang	-	-	-
JUMLAH		4	193	552



Tabel 86
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada
Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)
di Kabupaten Kapuas

Jenis Komoditi	Banyaknya Unit Usaha			Banyaknya Tenaga Kerja		
	Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Sub Kelompok Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka						
1. Pandai Besi.	13	-	13	39	-	39
1. Pembuatan Kapal Kayu	8	-	8	24	-	24
2. Jasa Perbaikan Kapal/Perahu	8	-	8	24	-	24
3. Perbaikan Kapal Besi	-	-	-	-	-	-
4. Pembuatan Perhiasan Dari Emas (logam mulia)	12	-	12	19	-	19
5. Service Sepeda Motor/Mobil.	26	-	13	94	-	94
6. Teralis	13	-	-	39	-	39
7. Damar Buatan	-	-	6	18	-	18
8. Ukiran Getah Nyatu	6	-	-	-	-	-
9. Jasa Kecantikan	-	-	-	-	-	-
10. Pembuatan keperluan rumah tangga dari bahan fiber glass	-	-	-	-	-	-
Sub Kelompok Industri Aneka						
1. Konveksi (Pakaian jadi)	23	-	23	66	-	66
2. Service Elektronik.	14	-	14	27	-	27
3. Kacamata (Optik)	4	-	4	9	-	9
J U M L A H	127	-	127	359	-	359

2. Perdagangan

Ekspor karet masih merupakan komoditi andalan bagi Kabupaten Kapuas untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah yang direalisasikan berbagai bentuk seperti retribusi, pajak dan bagi hasil dari perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data tahun 2012 jumlah ekspor karet mengalami penurunan dari 11.478,57 Ton di tahun 2011 menjadi 10.725,32 Ton.

Berdasarkan data jumlah pedagang yang terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut klasifikasi dari Kecamatan di Kabupaten Kapuas, maka pada tahun 2012 jumlah pedagang besar 12 buah, pedagang menengah 149 buah dan pedagang kecil 251 buah. Jika

dilihat banyaknya perusahaan menurut bentuk perusahaan maka terdapat 10 buah Koperasi, 41 Buah CV, 10 buah PT dan 272 buah perusahaan perorangan.

Tabel 9
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Karet Daerah Kabupaten Kapuas

No	Tahun	Volume (Ton)	Nilai (\$ US)
1	2	3	4
1	2008	10.090,89	26.371.990,33
2	2009	10.660,16	16.360.174,06
3	2010	11.806,74	39.130.141,94
4	2011	11.478,57	52.132.604,36
5	2012	10.725,32	34.802.069,92

Tabel 10
Data Perusahaan Menurut Bentuk Perusahaan Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2012

No	Kecamatan	PT	Koperasi	CV	FA	Perorangan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapuas Kuala	-	1	-	-	-	1
2	Tamban Catur	-	-	-	-	-	-
3	Kapuas Timur	-	-	1	-	13	14
4	Selat	9	-	33	-	42	84
5	Bataguh	-	-	-	-	3	3
6	Basarang	-	-	-	-	-	-
7	Kapuas Hilir	-	-	3	-	6	9
8	Pulau Petak	-	-	-	-	-	-
9	Kapuas Murung	-	-	1	-	1	2
10	Dadahup	-	-	-	-	-	-
11	Kapuas Barat	-	-	-	-	2	2
12	Mantangai	1	-	1	-	-	2
13	Timpah	-	-	-	-	1	1
14	Kapuas Tengah	-	2	1	-	4	7
15	Pasak Talawang	-	6	-	-	-	6
16	Kapuas Hulu	-	-	1	-	-	1
17	Mandau Talawang	-	1	-	-	-	1
JUMLAH		10	10	41	-	72	133

Tabel 11.9
Jumlah Pedagang Terdaftar Pada Dinas Perindagkop UMKM
Menurut Klasifikasi dan Kecamatan
di Kabupaten Kapuas Tahun 2012

No	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kec. Kapuas Kuala	-	-	1	1
2	Kec. Kapuas Timur	-	-	14	14
3	Kec. Selat	-	13	69	82
4	Kec. Basarang	-	-	-	-
5	Kec. Kapuas Hilir	-	-	10	10
6	Kec. Pulau Petak	-	-	-	-
7	Kec. Kapuas Murung	-	-	2	2
8	Kec. Kapuas Barat	-	-	2	2
9	Kec. Mantangai	-	-	2	2
10	Kec. Timpah	-	-	1	1
11	Kec. Kapuas Tengah	-	-	7	7
12	Kec. Kapuas Hulu	-	-	1	1
13	Kec. Pasak Talawang	-	-	6	6
14	Kec. Dadahup	-	-	1	1
15	Kec. Bataguh	-	-	3	3
16	Kec. Mandau Talawang	-	-	1	1
J U M L A H		0	13	119	133

Pembinaan, pengawasan, dan pendistribusian terhadap barang beredar, kemetrolagian, dan perlindungan konsumen bertujuan agar semua barang yang beredar yang ada di Kabupaten Kapuas dapat dikendalikan dan diawasi. Dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas dituntut untuk memfasilitasi kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi. Kajian tentang kemetrolagian dan pelayanan tera serta sarana dan prasarana di dalamnya perlu segera dipenuhi untuk menunjang pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Koperasi.

Jumlah koperasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah koperasi cenderung meningkat dari 283 buah pada tahun 2008 menjadi 388 pada tahun 2012. Dan hingga tahun 2013 jumlah koperasi di Kabupaten Kapuas berjumlah 389.

Dari 388 buah tersebut, 136 buah adalah jenis koperasi KSU dan KUD di sektor Pertanian, 83 buah adalah jenis koperasi Konsumsi /Fungsional (KPRI) dan 169 buah adalah jenis koperasi lainnya. Pada umumnya sebagian besar koperasi tersebut berada di Kecamatan Selat. Jika dilihat dari keanggotaan maka jumlah anggota selama kurun waktu 2008-2012 cenderung meningkat dari 27.689 orang pada tahun 2008 menjadi 31.830 orang pada tahun 2012. Sebagian besar dari jumlah anggota tersebut berada pada jenis koperasi pertanian (KUD) dan Konsumsi KPRI). Lain halnya kalau dilihat dari jumlah simpanan, maka selama periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari Rp. 7.372.694.000,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 16.923.605.000,- pada tahun 2012. Simpanan anggota terbesar sebesar Rp. 6.999.636.000,- terdapat pada jenis koperasi konsumsi (KPRI).

Tabel 12.10
Data Perkembangan Koperasi

No	Keterangan	Tahun		Perkembangan	Persentase (%)
		2011	2012		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah koperasi di Kabupaten Kapuas	354	388	34	40,62
2	Jumlah koperasi tidak aktif	103	103	0	0
3	Jumlah koperasi aktif	242	285	43	47,25
4	Jumlah anggota	30.120	31.830	1.710	12,84
5	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	60	81	20	20,52
6	Manajer	11	11	0	0
7	Karyawan	129	123	(- 6)	(- 0,15)
8	Modal sendiri	14.673.078.962	16.923.605.277	2.250.526.315	24,32
9	Modal luar	11.646.149.828	11.575.689.328	(- 70.460.500)	(-10,78)
10	Asset	26.139.228.790	28.499.294.605	2.360.065.815	22,51
11	Volume usaha	25.487.529.720	27.618.451.035	2.130.921.315	22,28
12	Sisa Hasil Usaha (SHU)	2.786.024.344	2.778.182.931	(- 7.841.413)	(- 7,17)

Tabel 13
Perkembangan Perkuatan Modal Kepada Koperasi dan LKM
Kabupaten Kapuas.

No	PROGRAM	Tahun	Koperasi dan LKM		Jumlah Kredit Yang Diterima
			Koperasi	LKM	
1	Dana Debitur.	2000	7	-	700.000.000
2	Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).	2001	-	3	250.000.000
3	Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).	2002	2	-	200.000.000
4	Dana Bergulir, melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS-BBM).	2003	4	-	400.000.000
5	Modal Awal Padanan (MAP).	2001	1	-	200.000.000
6	Modal Awal Padanan (MAP).	2002	1	-	200.000.000
7	Modal Awal Padanan (MAP).	2003	1	-	150.000.000
8	Program Sektoral.	2005	1	-	1.000.000.000
9	Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)	2006	3	-	250.000.000
10	Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)	2007	1	-	100.000.000
11	Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkasa).	2007	1	-	100.000.000
12	Program Pengembangan Usaha Koperasi untuk Daerah pedesaan perkotaan	2011	4	1	200.000.000

Tabel 14
Perkembangan Bantuan Pembangunan Pasar Tradisional
Tahun 2013.

No	Program	Tahun	Koperasi	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Bantuan Pembangunan Pasar tradisional Desa Terusan Mulya Kecamatan Bataguh	2012	1	800.000.000	Bangunan Telah selesai



Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas mempunyai rencana- rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2008 – 2012 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan.

Keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas yang disajikan merupakan keberhasilan pencapaian sasaran/target utama yang ada. Keberhasilan pencapaian program-program utama tersebut ditunjukkan oleh capaian indikator kinerjanya seperti pada tabel 4. T-IV.C.2

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kuala Kapuas

Tabel. T-IV.C.2

[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas, sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM mengalami permasalahan, tantangan dan peluang antara lain :

a. Tantangan :

1. Banyaknya proposal permohonan bantuan, baik bantuan berupa peralatan dan bantuan modal, maka diperlukan data yang valid untuk menyalurkan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan/ketidakadilan, supaya tidak terjadi permasalahan yang ada dimasyarakat yang tidak menerima bantuan.
2. Pembinaan IKM hanya diperuntukkan kepada sentra yang potensial sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat pembinaan. Hal ini berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sentra yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kurangnya pembinaan.
3. Banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha.
4. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.
5. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.

b. Peluang :

1. Banyaknya proposal yang masuk merupakan peluang untuk pemberdayaan IKM yang lebih luas dan tidak terfokus pada satu jenis serta satu wilayah saja.
2. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM.
3. Banyaknya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi pengembangan KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) yang belum tergarap secara optimal.
4. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal usaha bagi IKM, UKM serta Koperasi

5. Tingginya keinginan masyarakat untuk mendirikan Koperasi
6. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
7. Tingginya keinginan koperasi yang belum berbadan hukum untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum
8. kesadaran masyarakat yang tinggi tentang masalah perijinan.
9. kesadaran masyarakat yang tinggi tentang permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh Industri.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi masalah dan tantangan utama pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas antara lain :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendah profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya.
2. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM
3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.
5. Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas dan masih belum dapat dikembangkan secara optimal.
6. Banyaknya UKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan sebetulnya banyak sekali undangan untuk mengadakan pameran yang dilaksanakan dipulau Jawa, Bali dan Batam, yang sebetulnya berdampak pada omzet penjualan/pemasaran produk tetapi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut.
7. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
8. Belum adanya tenaga ahli penera dibidang kemetrolgian
9. Masih terbatasnya fasilitasi pembinaan, kemitraan, akses ke sumberdaya modal dan pemasaran kepada pelaku bidang perdagangan, perindustrian, koperasi UMKM termasuk pembinaan terhadap pedagang kaki lima (sektor informal).

10. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar, kemetrollogian dan perlindungan konsumen.

Tabel T-IV.C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM
Kabupaten Kapuas

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD		Kewenangan SKPD	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008	▪ Kementerian Perindustrian RI ▪ Kementerian Perdagangan RI ▪ Kementerian Koperasi dan UKM RI	1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendah profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya. 2. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM 3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. 4. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. 5. Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas dan masih belum dapat dikembangkan secara optimal. 6. Banyaknya UKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan sebetulnya banyak sekali undangan untuk mengadakan pameran yang dilaksanakan dipulau Jawa, Bali dan Batam, yang sebetulnya berdampak pada omzet penjualan/pemasaran produk tetapi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut. 7. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika

TABEL T-IV.C.12
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI UMKM BERDASARKAN
SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA BESERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD KABUPATEN	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	-	-	-
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	-	-	-
3	Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	➢ Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan ➢ Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Kurangnya inovasi dalam memasarkan produk UMKM	Mengikutsertakan UKM dalam pameran Smes'co yang diadakan setiap tahun di Jakarta
4	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah	Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM	Kendala persyaratan dari perbankan	Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM secara optimal
5	Meningkatkan jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	➢ Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme para pengelola koperasi dan sector usaha lainnya. ➢ Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan	Dana yang disesuaikan untuk meningkatkan SDM baik konseptual maupun material tidak sepadan dengan target input yang diinginkan	Mengikutsertakan pada diklat dan kursus bagi pengurus koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
6	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	-	-	-
7	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	-	-	-
8	Meningkatnya perijinan usaha	-	-	-
9	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Tidak adanya tenaga teknis laboratorium untuk operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgian daerah	Tidak adanya tenaga ahli penera/tera ulang	Mengikutsertakan personil pada diklat kemetrolgian di Bandung
10	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan permodalan	-	-	-

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU,
SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL
MERATA SERTA BERKELANJUTAN**

Makna dari pernyataan Visi tersebut, yaitu:

Lebih Maju: memiliki arti percepatan pembangunan yang bergerak kedepan menuju kondisi masyarakat yang sehat, cerdas dan memiliki daya beli.

Sejahtera: memiliki arti bahwa pembangunan diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing masyarakat didukung dengan kondisi daerah yang aman.

Mandiri: memiliki arti pembangunan diarahkan kepada perwujudan kemandirian daerah dengan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Pembangunan yang Adil: memiliki arti bahwa pembangunan berimbang untuk seluruh masyarakat.

Pembangunan yang Merata: memiliki arti bahwa pembangunan dilakukan secara merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Kapuas.

Pembangunan yang Berkelanjutan: memiliki arti bahwa pembangunan dilakukan secara menerus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah.

Ada 14 Misi Kepala Dinas dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yakni sebagai Berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan

pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.

2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang
3. Mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ke tiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat kabupaten kapuas melalui kelembagaan adat dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 Tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan Balai Latihan Kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.

12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir adat, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, Tenaga Kesehatan dan Guru Non PNS, Penyediaan Fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Menelaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama Kepemimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah tersebut.

Adapun Misi yang berkaitan dengan Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas adalah :

1. **Misi ke 4** yakni, Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
2. **Misi ke 5** yakni, Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan
3. **Misi ke 7** yakni, Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
4. **Misi ke 14** yakni, Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, Tenaga Kesehatan dan Guru Non PNS, Penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Tabel. 16. T-IV.C.II Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

TABEL T-IV.C.11
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI
DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANGLEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUIPEMBANGUNAN YANG ADIL
DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	MISI 4 : Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi			
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	-	-	-
2	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	➢ Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan ➢ Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Kurangnya inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM	Mengikutsertakan UKM dalam pameran Smes'co yang diadakan setiap tahun di Jakarta
	MISI 5 : Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan			
3	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM	Kendala persyaratan dari perbankan	Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM secara optimal

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme para pengelola koperasi dan sector usaha lainnya. - Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibubarkan	Dana yang disesuaikan untuk meningkatkan SDM baik konseptual maupun material tidak sepadan dengan target input yang diinginkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah	Mengikutsertakan pada diklat dan kursus bagi pengurus koperasi
5	Program pengembangan industri kecil dan menengah	-	-	-
	MISI 7 : Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara			
6	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas dan masih belum dapat dikembangkan secara optimal	Kurangnya inovasi produk	Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya saing produk

3.3. Telaahan Renstra SKPD

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas pada dasarnya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun seiring dinamika dan tuntutan yang berkembang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas diharapkan mengembangkan peluang pelayanan baru tanpa keluar dari batasan tupoksi. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menelaah amanat Renstra Kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Tengah sehingga diantara pelaksana urusan Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM terdapat sinkronisasi dan penyelarasan.

Renstra Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 adalah ” **Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan**”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2. Memperkuat pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Adapun Tujuan Strategis yang ingin diwujudkan adalah :

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas.

5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai.
7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga.
9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Kementerian Perdagangan di atas, maka sebagian besar kebijakan relatif selaras dengan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas. Kebijakan dan program yang perlu memperoleh penajaman adalah :

- a. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. Masalah sekaligus potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas adalah tersedianya sarana prasarana perdagangan yang memadai. Secara kongkrit dirasakan masih terbatasnya pasar tradisional baik secara kuantitas maupun kualitas, serta sebarannya.
- b. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan pusat. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas perlu terus melakukan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga menjadi faktor terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Pelayanan publik yang berstandar harus terus diupayakan sinergi dengan target Renstra Kementerian Perdagangan dengan target waktu pelayanan yang makin dipercepat. Selain itu perlu ditunjang oleh regulasi lokal yang memberikan daya tarik berusaha tanpa mematikan usaha lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.

Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian 2010-2014 adalah **“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”**. Adapun misinya ada 7, yaitu :

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingginya nilai tambah industri.
2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri.
4. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri.
5. Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur industri.
6. Tersebar nya pembangunan industri.
7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014 adalah : **“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat”**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010 - 2014 adalah :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional.
2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM.
 - c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui :

Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (*passion*) kewirausahaan di kalangan masyarakat

c. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.

7. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
- b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

Analisis Renstra Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Koperasi UKM Propinsi Kalimantan Tengah yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas terhadap sasaran Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UKM dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi UKM Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Hasil review terhadap renstra tersebut dapat dilihat pada tabel 17. T-IV.C5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas terhadap Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah, Renstra Dinas Koperasi UKM Propinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI.

TABEL T-IV.C.5
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD DINAS KABUPATEN
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROPINSI DAN RENSTRA K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten sd 2018						Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi		Sasaran pada Renstra K/L
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/ besar	5	5	8	10	15	15	✓		✓
2	Jumlah usaha kecil meningkat	398	408	423	443	468	498	✓		✓
3	Jumlah koperasi aktif	398	408	423	443	468	498	✓		✓
4	Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	3	5	5	6	10	12	✓		✓
5	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan permodalan	25	30	35	40	50	60	✓		✓
6	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/ BUMN kepada koperasi dan UKM meningkat	35.000.000.000,-	58.745.111	65.992.111	70.326.111	75.289.111	80.377.111	✓		✓

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas

Tahun 2013-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.06.15.4	2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah pelayanan tera dan tera ulang (kali)	1	1	48.000	1	50.000	1	60.000	1	70.000	1	80.000	1	80.000	Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.06.15.2	3. Fasilitas penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah sarana untuk pengujian bahan-bahan berbahaya (paket)	1	1	30.000	1	30.000	1	35.000	1	40.000	1	45.000	1	45.000	Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			2.06.15.3	4. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (kali)	4	4	110.000	4	112.000	4	115.000	4	121.000	4	130.000	4	130.000	Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperindagkop UMKM	Kabupaten Kapuas
			Jumlah					2.894.000		2.959.000		3.290.000		3.658.000		4.065.000		4.065.000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan selanjutnya diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan (1) Urusan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan (2) Menyelenggarakan tugas pembantuan dan (3) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Masing-masing kewajiban tersebut adalah merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan menyeluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD maka untuk masing-masing kewajiban tersebut perlu ditetapkan indikator keberhasilannya terutama untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

TUJUAN RPJMD

1. Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

TUJUAN PADA RENSTRA DINAS

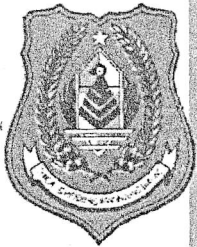
- 1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas
- 2) Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri.
- 3) Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistim pendukung usaha bagi KUKM
- 4) Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan
- 5) Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal

SASARAN PADA RPJMD

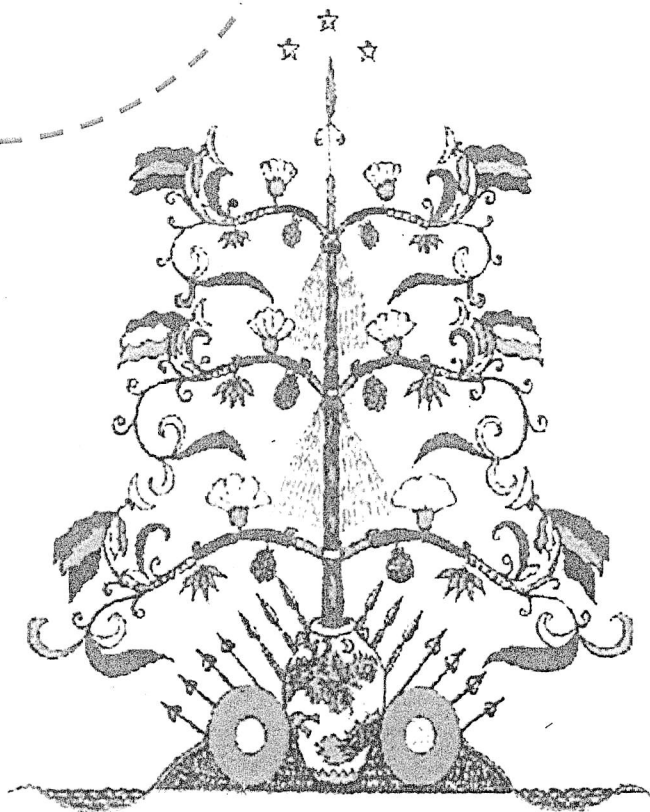
1. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
2. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal
3. Menurunnya angka kemiskinan
4. Meningkatnya daya beli masyarakat
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

SASARAN PADA RENSTRA DINAS

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keua
3. Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM
4. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah



**RENCANA STRATEGIS SKPD
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2013-2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS**

*Jl. Tambun Bungai No. 7 Kuala Kapuas Telp. 0513-22013 Fax 0513-24300
Email: disperindagkapuas@yahoo.co.id Blog: www.disperindagkapuas.blogspot.com*

JULI 2013



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 639 /BAPPEDA TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018

BUPATI KAPUAS,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Renstra SKPD harus selaras dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program SKPD dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Mengingat

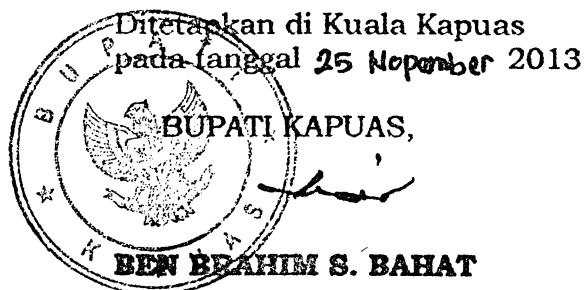
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus ditetapkan oleh Kepala SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai rencana tahunan dan merupakan penjabaran RENSTRA SKPD periode 2013-2018.
- KETIGA : Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



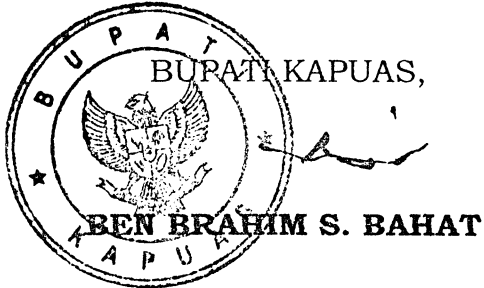
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
Up. a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
c. Inspektur Jenderal
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Masing-masing Kepala SKPD untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 699 /BAPPEDA TAHUN 2013
TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2013-2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
5.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
6.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
7.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLIKULTURA KABUPATEN KAPUAS
8.	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS
9.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS
10.	DIANS PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS
11.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KAPUAS
12.	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS
13.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS
14.	DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
15.	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN KAPUAS
16.	DNAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KAPUAS
18.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS
19.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS
20.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
22.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
24.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
25.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
26.	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS
27.	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS
28.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS
29.	KANTOR SANDI DAERAH KABUPATEN KAPUAS
30.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS
31.	RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN KAPUAS
32.	KECAMATAN SELAT
33.	KECAMATAN BATAGUH

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
34.	KECAMATAN KAPUAS HILIR
35.	KECAMATAN KAPUAS TIMUR
36.	KECAMATAN KAPUAS KUALA
37.	KECAMATAN TAMBAN CATUR
38.	KECAMATAN PULAU PETAK
39.	KECAMATAN KAPUAS MURUNG
40.	KECAMATAN BASARANG
41.	KECAMATAN DADAHUP
42.	KECAMATAN KAPUAS BARAT
43.	KECAMATAN MANTANGAI
44.	KECAMATAN TIMPAH
45.	KECAMATAN KAPUAS TENGAH
46.	KECAMATAN KAPUAS HULU
47.	KECAMATAN MANDAU TALAWANG
48.	KECAMATAN PASAK TALAWANG



Lampiran : Keputusan Bupati Kapuas

Nomor : 699/2013
Tanggal : 25/11/2013

**Berita Acara Verifikasi Akhir
Rancangan Akhir Renstra SKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018**

Pada hari *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Nopember* tahun *Dua Ribu Tiga Belas* telah dilakukan verifikasi akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 pada:

Nama SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas

Koordinasi Bidang : Ekonomi Bappeda Kabupaten Kapuas

Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 tersebut, telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian Visi dan Misi SKPD
2. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran SKPD
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra SKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

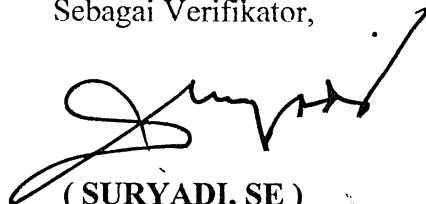
Kuala Kapuas, 20 Nopember 2013

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah
Kabupaten Kapuas,



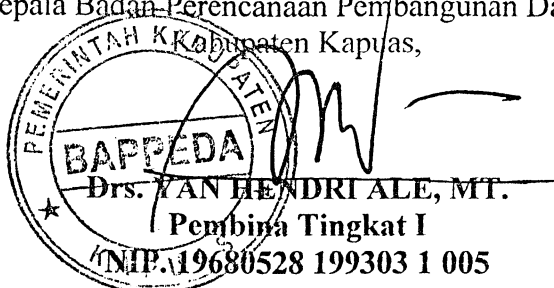
(Drs. TERAS D. SUHIN)
NIP. 19580515 198503 1 023

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda
Kabupaten Kapuas
Sebagai Verifikator,



(SURYADI, SE)
NIP. 19581231 198608 1 004

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmat-Nya, Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas dapat terselesaikan dengan baik.

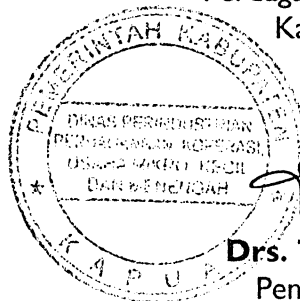
Penyusunan Rencana Strategis ini digunakan dalam menentukan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD maupun APBN selama 5 Tahun yakni Tahun 2013 – 2018.

Apabila dalam penyusunan Rencana Strategis ini ada kekurangan dan kelemahan yang bersifat teknis maupun kualitatif, diharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan revisi yang konstruktif.

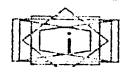
Semoga Penyusunan Rencana Strategis ini dapat mewakili Komitmen dalam menciptakan kinerja yang progresif, transparan dan akuntabel.

Kuala Kapuas, Juli 2013.

Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi UMKM
Kabupaten Kapuas,




Drs. TERAS D. SUHIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580515 198503 1 023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	I
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi SKPD	10
2.2 Sumberdaya SKPD	14
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kab. Kapuas	53
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	58
4.3 Strategi dan Kebijakan	61
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	65
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	14
Tabel 2.	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas.....	15
Tabel 4.	Data Perkembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan di Kabupaten Kapuas s/d Desember 2012.....	18
Tabel 5.	Usaha Anyaman Rotan Kabupaten Kapuas	19
Tabel 6.	Banyak Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) di Kabupaten Kapuas	20
Tabel 7.	Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Karet Daerah Kabupaten Kapuas	21
Tabel 8.	Data Perusahaan Menurut Bentuk Perusahaan Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas.....	23
Tabel 9.	Jumlah Pedagang Terdaftar Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Menurut Klasifikasi dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas.....	22
Tabel 10.	Data Perkembangan Koperasi.....	23
Tabel 11.	Perkembangan Perkuatan Modal Kepada Koperasi dan LKM Kabupaten Kapuas	24
Tabel 12.	Perkembangan Bantuan Pembangunan Pasar Tradisional tahun 2013	24
Tabel 13.	T-IV.C.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas 2008-2013	26
Tabel 14.	T-IV.C.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas	27

Tabel 15	T-IV.C.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas	32
Tabel 16	T-IV.C.12 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindagkop UMKM Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	33
Tabel 17	T-IV.C.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian VISI, MISI dan Program Kepala Daerah	38
Tabel 18	T-IV.C.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L.....	46
Tabel 19	T-IV.C.14 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	49
Tabel 20	T-IV.C.15 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	50
Tabel 21	T-IV.C.16 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	50
Tabel 22	T-IV.C.10 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Kapuas Dinas Perindagkop UMKM	52
Tabel 23	T-IV.C.21 Penyusunan Penjelasan Visi Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Kapuas	54
Tabel 24	T-IV.C.23 Penyusunan Penjelasan Misi Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Kapuas	57
Tabel 25	T-IV.C.24 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	59
Tabel 26	T-IV.C.26 Penentuan Strategi.....	61
Tabel 27	T-IV.C.27 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	63

Tabel 28	T-IV.C.28 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Periode 2014-2018.....	66
Tabel 29	T-IV.C.29 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Bagan Alir Penyusunan Renstra	5
Gambar	2	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Strategis merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UMKM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 merupakan tahap awal disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013.

Proses dalam Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan visi, misi dan program Bupati.
2. Pembahasan dengan Kepala Bidang dan Sekretariat dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas.
3. Konsultasi hasil dengan Bappeda Kabupaten Kapuas.
4. Rencana strategis dengan memperhatikan hasil Musrenbang.

Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pendekatan antara lain :

1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up)**, pendekatan top-down dan bottom-up ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana

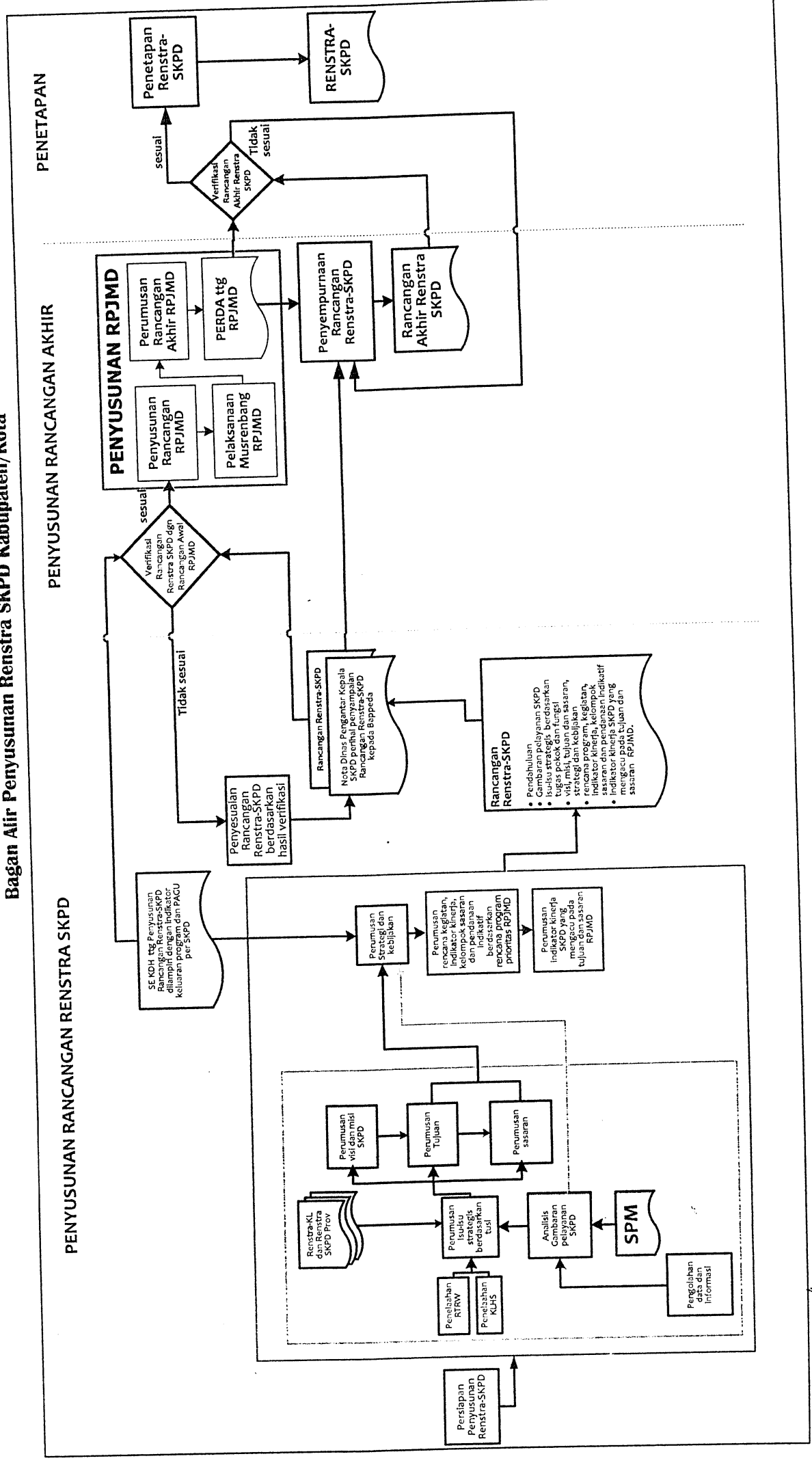
hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang di laksanakan baik ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Renstra sebagai pedoman kerja SKPD diatur dalam UU No 25 / 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU No 17 / 2003, tentang Keuangan Negara. Hubungan rangkaian dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan mikro politis berwawasan 20 tahun dan memuat visi, misi dan arah Pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah selama 5 tahun ;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program 5 Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Kapuas ;
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten ;
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan 2 tahun kedepan ;

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan komplilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Beberapa muatan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Hukum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286) ;
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang No 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
8. Undang-Undang No 26 Tahun 2007, tentang Penataan ;
9. Undang-Undang No 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
16. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
17. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
18. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategis SKPD ini disusun dengan maksud :

1. Dengan adanya Renstra SKPD ini yang ditetapkan melalui Perda akan memiliki acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Tahunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan melalui pembiayaan APBN.

2. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif selama 5 tahun.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran. Pelaksanaan dan Pengendalian.
2. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Terjadinya koordinasi antara pelaku pembangunan melalui penyusunan Rencana Kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan anggaran yang bersifat indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra SKPD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis